usaha kesejahteraan sosial dalam memecahkan suatu masalah sosial yang terjadi. Definisi Kesejahteraan Sosial menurut Suharto (2010:1). sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu.

Definisi di atas menjelaskan bahwa masalah kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab semua orang termasuk pemerintah terkait untuk mengatasi dan menanggulangi masalah di suatu wilayah. Kesejahteraan sosial menunjuk pada segenap aktivitas perorganisiran dan pendistribusian pelayanan sosial untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat bagi individu, kelompok dan masyarakat yang kurang beruntung, sehingga mereka dapat kembali berfungsi secara sosial. Definisi Kesejahteraan Sosial Menurut Friedlander dalam Fahrudin, (2012: 9) adalah sebagai berikut:

Sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sosial sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Definisi di atas menunjukan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem usaha kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok, maupun masyarakat. Dengan demikian pelayanan sosial dapat dimanifestasikan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau terlambat dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya baik secara ekonomi maupun sosialnya. Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal. Ia telah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani secara sepihak tanpa terorganisir kondisi sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada, masalah sosial bisaberupa macam-macam masalah seperti kemiskinan, anak terlantardan sebagainya. Fokus utama dari ilmu kesejahteraan sosial ini adalah mencegah, mengatasi, dan mengurangi masalah-masalah sosial dan mengembalikan keberfungsiam sosial seseorang, kelompok dan masyarakat.

Definisi lain mengenai kesejahteraan sosial menurut Midgley dalam Isbandi (2005 : 15-16) adalah “Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan”. Definisi tersebut bisa disimulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah dimana suatu kondisi terpenuhinya suatu kebutuhan manusia yang lebih mendasar dan dapat dikelola dengan baik tanpa menimbulkan suatu masalah. Maka dari itu pemerintah terkait harus mampu memberikan kebutuhan yang merata dan adil pada setiap warganya agar tidak terjadi suatu masalah.

Melihat konsepsi kesejahteraan sosial, ternyata masalah-masalah sosial dirasakan berat dan mengganggu perkembangan masayarakat, sehingga perlu dilaksanakan pelayanan sosial yang teratur. Dalam hal ini, tanggung jawab pemerintah semakin ditingkatkan terkait pembinaan bagi kesejahteraan warga masyarkatnya. Definisi Kesejahteraan Sosial menurut Huraerah (2003:153), yaitu: “Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan atau sekumpulan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang bermasalah”. Berdasarkan definisi tersebut dapat memberikan gambaran, bahwa kesejahteraan sosial membantu orang-orang yang bermasalah dengan mendayagunakan kegiatan-kegiatan yang terpadu dan sistematis untuk meningkatkan fungsi sosialnya di masyarakat. Beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu: kondisi kehidupan sejahtera, institusi, dan aktivitas.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan didalamnya terdapat para pekerja sosial yang mampu membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat baik itu dari segi materil dan juga spiritual sehingga akan mendorong masyarakat menuju kearah kualitas hidup yang lebih baik dan mampu untuk mencapai fungsi sosialnya. Pemerintah terkait juga harus turut ikut adil untuk memberikan kualitas hidup yang lebih baik kepada masyarakatnya.

**2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial untuk mengembalikan keberfungsian sosial untuk setiap individu, kelompok dan masyarakat. Mampu meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup, menurut Fahrudin (2012:10), yaitu: “Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya”. Maksudnya tercukupinya kebutuhan-kebutuhan seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan sesama individu yang ada di lingkungannya. Terdapat tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial menurut Schneiderman dalam Fahrudin (2012:10), yaitu :

* 1. Pemeliharaan Sistem

Tujuan sistem ini mencakup pemeliharaan dan menjaga kesinambungan atau kelangsungan keberadaan serta tatanan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan definisi makna dan tujuan hidup, motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang maupun kelompok.

1. Pengawasan Sistem

Tujuannya adalah mengadakan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu yang meliputi: mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosaialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku misalnya kelompok kerja dan kelompok lain dalam masyarakat.

1. Perubahan Sistem

Tujuan sistem ini adalah mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap pasrtisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil, dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

Melihat penjelasan diatas tujuan dari kesejahteraan sosial sendiri adalah untuk melaksanakan program-program pengembangan masyarakat, ketenagakejaan, kesehatan, kesejahteraan keluarga dan semuanya itu bertujuan untuk mencapai sasaran pemeliharaan, kontrol, serta perubahan yang membantu setiap individu, kelompok, dan masyarakat agar mampu mempunyai standar kehidupan pokok yang dibutuhkan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

**2.1.3 Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Fungsi kesejahteran sosial adalah mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan perubahan sosial ekonomi, serta menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat agar terhindar dari masalah sosial yang baru. Fungsi Kesejahteraan sosial lainnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan sosial, perlindungan sosial, membangun masyarakat, dan memberdayakan masyarakat dalam tujuannya yaitu usaha kesejateraan sosial dalam skala pembangunan sosial. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial itu menurut Friedlander dan Apee dalam Fahrudin (2012:12), antara lain:

Fungsi Pencegahan (*Preventif*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru, juga langkah-langkah untuk memelihara fungsionalitas seseorang maupun masyarakat.

1. Fungsi Penyembuhan (*Curatif*)

Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup fungsi pemulihan (rehabilitasi).

1. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

1. Fungsi Penunjang

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

**2.1.4 Bidang-Bidang Kesejahteraan Sosial**

Secara konvensional ada beberapa bidang yang masuk dalam bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit menurut Fink (1974), Friedlander (1980), Mendoza (1981), dan Zastrow (1996) dalam Isbandi (2005:128), antara lain meliputi:

Bidang yang terkait dengan Sistem Penyampaian Layanan (*Service Delivery System*).

Bidang yang terkait dengan Layanan Sosial terhadap Keluarga.

Bidang yang terkait dengan Pelayanan terhadap Anak-Anak dan Generasi Muda.

Bidang yang terkait dengan Kesejahteraan Sosial untuk Lanjut Usia (Lansia).

Bidang yang terkait dengan Kelompok Khusus.

Bidang yang terkait dengan Jaminan Sosial (Bantuan Sosial dan Asuransi Sosial)

Bidang yang terkait dengan Pengentasan Kemiskinan.

Bidang yang terkait dengan Perumahan dan Lingkungan Sosial.

Bidang yang terkait dengan Layanan Kesehatan Masyarakat.

Bidang yang terkait dengan Perawatan Medik.

Bidang yang terkait dengan Layanan Kesehatan Jiwa.

Bidang yang terkait dengan Lembaga Koreksional

Bidang yang terkait dengan Lembaga Pendidikan.

Bidang yang terkait dengan Area Lain

**2.1.5 Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial**

Usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menigkatkan taraf kesejahteraan sosia. Usaha kesejahteraan sosial menurut undang-undang no. 11 tahun 2009 pasal 3 ayat 4 sebagai berikut : “Semua upaya untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan”.

Aspek yang harus diperhatikan dalam usaha kesejahteraan sosial menurut Suud (2006 : 80) sebagai berikut :

1. Menyediakan sumber-sumber pemecahan masalah yang memadai dan dapat dipakai oleh yang membutuhkan.

2. Pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial atau penggunaan sumber-sumber pemecahan masalah harus benar-benar dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan dua hal berikut :

a. Perencanaan pemecahan masalah yang sesuai dengan kenyataan. Dalam hal ini perlu di perhatikan penentuan-penentuan tujuan yang jelas akan tetapi bersifat dinamis.

b. Supervisi dan pengawasan pelaksanaan secara teratur agar usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dapat dinikmatin oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

3. Pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial harus tetap bersifat demokratik dan menggerakan sebanyak mungkin para pelaku dalam arti keterlibatan semua unsur dan sel-sel yang ada dalam masyarakat.

4. Menghindarkan dan menghilangkan akibat dampak yang buruk dari pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.

Usaha kesejahteraan sosial berfokus pada masyarakat yang membutuhkan suatu pelayanan untuk memecahkan masalah yang dialami. Usaha ini dilakukan guna membangun hubungan kerjasama yang baik terhadap masyarakat agar mereka yang merasa mengalami masalah dalam aspek-aspek kehidupan sosialnya bisa terbantu dengan pelayanan yang disediakan.

## 2.2 Konsep tentang Masalah Sosial

### 2.2.1 Definisi Masalah Sosial

Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan keinginan setiap warga masyarakat, oleh karna itu upaya-upaya yang dilakukan untuk penanganan masalah sosial diawali dengan identifikasi masalah yang dapat memberikan kesadaran akan adanya masalah sosial tertentu. Masalah sosial merupakan suatu fenomena yang sangat tidak diinginkan oleh semua warga masyarakat. Definisi Maslah sosial menurut Soekanto, (2013: 314) adalah sebagai berikut :

Masalah sosial merupakan suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau, menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan sosial.

Definisi di atas menjelaskan bahwa masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan unsur unsur kebudayaan masayartakat di sekitarnya, dan dapat mengahabat segala kehidupan individu dan kelompok untuk mencapai suatu cita-cita yang di inginkan. Masalah sosial menurut Robert K Merton dalam Huraerah (2011: 5) adalah sebagai berikut “Masalah sosial mendefinikan dengan menyebutkan ciri-ciri pokok masalah sosial. Baginya, ciri-ciri masalah sosial itu adalah adanya jurang perbedaan yang cukup signifikan antar standar-standar sosial dengan kenyataan sosial”. Dari definisi di atas dijelas bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak sesuai antara suatu keinginan dengan harapan yang tidak sesuai, serta tidak maksimal untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi. Menurut Weinberg, dikutip oleh Soetomo (2013: 7) menjelaskan tentang perngertian masalah sosial sebagai berikut :

Masalah sosial merupakan situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut.

Masalah sosial adalah suatu akibat dari interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok, perbedaan adat istiadat dan kebiasaan seseorang yang ditandai dengan suatu proses sosial yang disosiatif.

### 2.2.2 Komponen-Komponen Masalah Sosial

Menurut Parrio, (1987: 14) dalam Soetomo, (2013: 6) menyatakan: “Masalah sosial mengandung empat komponen, dengan demikian situasi atau kondisi sosial dapat disebut sebagai masalah sosial apabila terlihat indikasi keberadaan empat unsur tadi.” Komponen-komponen yang terdapat dalam masalah sosial adalah sebagai berikut :

1. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang dianggap sebagai masalah, tetapi dalam waktusingkat kemudian sudah hilang dengan sendirinya tidak termasuk masalah sosial
2. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau nonfisik, baik pada individu maupun masyarakat
3. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat
4. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan

Komponen tersebut saling berhubungan diantara satu dengan yang lain, masalah sosial hanya dapat bertahan diwaktu tertentu, dapat dirasakan banyak orang, menimbulkan kerugian dan barulah membutuhkan solusi untuk memecahkan masalah sosial tersebut.

### 2.2.3 Karakteristik Masalah Sosial

Karakteristik masalah sosial jika dilihat dari aspek-aspek tertentu, kriteria masalah sosial dapat dilihat secara sempit dan sebelah mata, karakteristik masalah sosial sebenarnya memiliki kriteria yang dapat ditetapkan secara jelas dan tepat. Karakteristik masalah sosial menurut Suharto [(2008: 71](tel:2008271)) adalah sebagai berikut :

1. Kondisi yang Dirasakan Banyak Orang.

Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai beberapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapatkan perhatian dan menjadiu pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial. Peran media masa sangat menentukan apakah masalah tertentu menjadi pembicaraan khalayak umum. Jika sejumlah artikel atau berita yang membahas suatu masalah muncul di media massa, masalah tersebut akan segera menarik perhatian orang. Kriminalitas adalah contoh masalah sosial.

1. Kondisi yang Dinilai Tidak Menyenangkan.

Menurut paham Hedonisme, orang cenderung mengulai sestuatu yang menyenangkan dan menghindari sesutau yang tidak menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan peran masyarakat sangat penting dalam menentukan sutau kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya. Ukuran ‘baik’ atau 'buruk' sangat bergantung pada nilai atau norma yang dianut masyarakat. Pengunaan narkotika, minuman keras, homoseksual, bahkan bunuh diri adalah masalah sosial, apabila nilai atau norma masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk atau bertentangan dengan aturan-aturan umum.

1. Kondisi yang Menuntut Pemecahan.

Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senatiasa menuntut pemecahan jika seseorang merasa lapar akan segera dicarinya rumah makan, umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasakan bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan.

1. Pemecahan Tersebut Harus Dilakukan Melalui Aksi Sosial Secara Kolektif.

Masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah sosial Individual dapat diatasi secara perorangan atau satu persatu tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial (social engineering) seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

## 2.3 Tinjauan tentang Kemiskinan

### 2.3.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini. Kemiskinan adalah hal masalah sosial yang cukup banyak terjadi di wilayah tertentu yang tingkat kesejahteraannya rendah. Pekerjaan sosial berperan penting dalam menanggulangi kemiskinan, karena kemiskinan adalah bentuk masalah sosial yang serius dan keberfungsian sosial seseorang menjadi terganggu. Krisis ekonomi telah menetaskan kemiskinan dan kelaparan di berbagai daerah di tanah air. Meski di tingkat makro pemerintah selalu mengklaim bahwa kondisi Indonesia sudah membaik, inflasi telah dapat ditekan dan dikembalikan, atau klaim apa pun yang menunjukkan kemajuan di tingkat makro, namun realitasnya di tingkat mikro puluhan juta penduduk Indonesia masih hidup dalam lilitan kemiskinan. Data Indonesia dan negara lain menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara kurang gizi dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab pokok atau akar  masalah gizi buruk. Proporsi anak yang gizi kurang dan gizi buruk berbanding terbalik dengan pendapatan. Makin kecil pendapatan penduduk, makin tinggi presentasi anak yang kekurangan gizi, dan makin tinggi pendapatan makin kecil presentasinya. Pada gilirannya, kurang gizi berpotensi sebagai penyebab kemiskinan melalui rendahnya pendidikan dan produktivitas. Di sinilah lingkaran kemiskinan akan terus berputar. Gizi buruk secara langsung dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu anak tidak cukup mendapat makanan bergizi, anak tidak mendapat asupan gizi yang memadai, dan anak mungkin menderita infeksi penyakit.

Definisi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, (2002: 4) dalam Suharto, (2014: 133) adalah sebagai berikut :

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*proverty line*) atau batas kemiskinan (*proverty threshold*). Garis kemiskinan dalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Kemiskinan sebagai segi ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Paradigma lain mendefinikan kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan atau kondisi disfungsi, yaitu kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kebutuhan dasar lainnya yang tidak terpenuhi.

### 2.3.2 Bentuk Kemiskinan

Bentuk kemiskian dapat dikategorikan pada empat dimensi utama, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan dapat dibentuk berdasarkan tingkatan yang sesuai. Bentuk kemiskinan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidak mampuan seseorang atau kelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan, pakian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Penentuan kemiskian absolut ini biasanya diukur melalui batsan kemiskinan atau garis kemiskinan (poverty line) baik yang berupa indikator tunggal maupun komposit, seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar atau kombinasi beberapa indikator untuk mempermudah pengukuran atau indikator tersebut umumnya di konvensikan dalam bentuk uang ( pendapatan atau pengeluaran ). Dengan demikian seseorang atau sekelompok orang yang kemampuan ekonominya berada dibawah garis kemiskinan, dikategorikan sebagai miskin secara absolut.

1. Kemiskinan Relatif

Kemiskian relatif adalah keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan kondisi umumnya suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan masalnya Rp. 100.000 per kapita perbulan, seseorang yang memiliki pendapatan Rp. 200.000 per kapita per bulan secara absolut tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat sekitar Rp. 400.000, maka secararelatif orang atau keluarga tersebut termasuk orang miskin.

1. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orentasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (moderenisasi). Sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi (*need for achievement*), fatalis, berorentasi ke masa lalu, tidak memiliki jiwa wirausaha adalah beberapa ciri yang memadai untuk kemiskinan kultural.

1. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan olehketidak beresan ataupun ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau selompok orang menjangkau sumber-sumber kehidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka Proses dan praktek monopoli, oligopoli dalam bidang ekonomi, misalnya, melahirkan mata rantai kemiskinan yang sulit dipatahkan. Sekuat apapun motovasi dan kerja keras seseorang, dalam kondisi struktur demikian, tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, karena aset yang ada serta akses terhadap sumber-sumber telah sedemikian rupa dikuasai oleh segolongan orang-orang tertentu. Contohnya para petani yang tidak memiliki tanah sendiri atau memiliki hanya sedikit lahan tanah, para nelayan yang tidak mempunyai perahu dan peralatan menangkap ikan, para pekerja yang tidak trampil (*unskilled labour*), termasuk kedalam mereka yang berada dalam golongan kemiskinan struktural.

### 2.3.3 Ciri-Ciri Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi atau fenomena. Kemiskinan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang individu, tetapi kemiskinan untuk dapat terlihat secara tepat yaitu dengan melihat ciri-ciri dari kemiskinan. Ciri-ciri kemiskinan menurut Suharto, (2004: 7) adalah sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan komsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegitan sosial masyarakat
7. Ketiadaan akses terhadap terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Kemiskinan dapat dilihat dari segi paling konteks, dengan adanya ciri utamanya yaitu adanya kebefungsian sosial masyarakat yang belum terpenuhi. Khususnya dalam menganggulangi kemiskinan pekerja sosial dapat membantu masyarakat miskin tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya dalam arti luas.

### 2.3.4 Dimensi-Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan memiliki banyak dimensi, kelompok miskin tertentu terutama kalangan usia produktif, pemberian modal usaha dan keterampilan. Dimensi-dimensi kemiskinan menurut David Cox, (2004: 1) dalam Suharto, (2014: 132) adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial, kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas akibat kondisi sosial yang tidak menguntungkan mereka, seperti bias jender, deskriminasi atau eksploitasi ekonomi.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

### 2.3.5 Penyebab Kemiskinan

Tidaklah mudah mencari penyebab kemiskinan yang bisa diterima secara umum. Menurut Tansey dan Ziegley (1991) dalam buku Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial (2004:8). Kemiskinan mempunyai tiga penyebab prinsip yaitu:

1. *Human Capital Deficiencies*,defisiensi modal amnusia berarti rendahnya kualitas sumberdaya manusia, seperti rendahnya pengetahuan dan keterampilan sehingga menyebabkan mendapatkan pekerjaan yang rendah pendapatannya dan rendahnya daya beli.
2. *insufficient Demand For Labor*, yakni rendahnya permintaan akan tenaga kerja sehingga meningkatkan pengangguran, pengangguran menyebabkan orang tidak memliki pendapatan, daya beli rendah akhirnya dapat memenuhi kebutuhan dasar.
3. *Disriminatior,*adanya perlakuan berbeda terhadap golongan tertentu terutama dalam aksesibilitas terhadap sumberdaya sumberdaya dan adanya dominasi pihak tertentu terhadap sumberdaya tersebut.

**2.3.6 Kriteria Kemiskinan**

Kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang di alami seseorang, baik akibat ketidak mampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidak mampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya. Kriteria yang menandai kemiskinan berdasarkan studi SMERU, Suharto (2006 : 132) dalam Suharto (2009 : 16) adalah sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan).

2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

3. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalanan, listrik, air).

5. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan asset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum).

6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan.

7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).

8. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat).

9. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

### 2.3.7 Klasifikasi Fakir Miskin

Fakir miskin yaitu orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan. Kebalikannya adalah orang-orang mampu dan berkecukupan. Seseorang dapat dikatakan mampu apabila dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi dirinya dan anggota keluarganya, berupa sandang, pangan, dan papan. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2013 tingkatan kemampuan warga atau masyarakat yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu adalah sebagai berikut :

1. Sangat Miskin adalah warga yang hanya memiliki kemampuan memenuhi kurang dari setengah kebutuhan dasarnya.
2. Miskin adalah warga yang memiliki kemampuan memenuhi lebih setengah dari kebutuhan dasarnya, tapi tidak mampu memenuhi kecukupan kebutuhan dasarnya.
3. Hampir miskin adalah warga yang memiliki kemampuan memenuhi hanya lebih sedikit dari kebutuhan dasarnya
4. Rawan miskin adalah warga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, akan tetapi kalu terjadi gejolak ekonomi/kenaikan harga harus menanggung biaya tidak terduga yang sifatnya mendesak (misalnya biaya pengobatan, maka ia akan jatuh miskin.

### 2.3.8 Kriteria Fakir Miskin

Kriteria fakir miskin berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
2. Sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga; dan
5. Kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai rumah yang dindingnya terbuat dari bamboo/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah; termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester.
7. Kondisi lantai rumahnya terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
8. Atap rumah terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
9. Penerangan bangunan tempat tinggalnya bukan dengan listrik, atau dengan listrik mencantol dari rumah tetangga;
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2/orang; dan
11. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Tolak ukur kriteria fakir miskin adalah penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan seseorang dan kualitas rumah yang dimiliki perlu untuk ditingkatkan kualitasnya, karena dengan terpenuhi kebutuhan papan bersama keluarganya keluarga tersebut dapat memenuhi menurut kehidupannya dengan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan juga dapat dikatakan sebagai bencana bagi pemerintah negara untuk menanganinya sangat sulit.

**2.4. Gizi**

**2.4.1. Definisi Gizi**

Dalam Kehidupan sehari-hari orang tidak terlepas dari makanan karena makanan adalah salah satu persyaratan pokok untuk manusia. Fungsi dari makanan adalah untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembagan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, meperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari. Agar makanan dapat berfungsi seperti itu maka makanan yang kita makan sehari-hari tidak hanya sekedar makanan, tetapi makanan yang kita makan harus mengandung zat-zat tertentu sehingga memenuhi fungsi tersebut, dan zat-zat ini disebut gizi. Definisi gizi menurut Rusilanti (2015: 1) adalah sebagai berikut :

Gizi adalah suatu proses organsime menggunakan makanan yang di konsumsi secara normal melalui proses pencernaan, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak di gunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi.

Kesehatan dan gizi merupakan kebutuhan bagi fungsi tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi optimal agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Orang tua terlibat secara khusus dalam mengajarkan dan memberikan dasar pengetahuan bagi anak tentang kebutuhan tubuh akan zat gizi, fungsi zat gizi bagi tubuh demi menjaga kesehatan anak melalui kesadaran orang tua dalam mementingkan gizi anak, dan peran masyarakat dan aparat pemerintah sekitar pun harus turut ikut serta dalam mengurangi angka gizi buruk dengan cara pemberian penyuluhan tentang pentingnya gizi bagi anak.

Permasalahan gizi masih sangat banyak terjadi di wilayah-wilayah pedesaan yang jauh dari pusat kota dan pemerintahan, karna kurangnya jangkauan pemerintah untuk memberikan penyuluhan terhadap warga masyarakat tentang pentingnya gizi bagi tumbuh kembang anak. Gizi buruk atau gizi kurang karena kurang seimbangnya asupan makanan yang di konsumsi. Menurut Depkes RI (2008) definisi gizi buruk sebagai berikut : “Keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan atau ditemukan tanda-tanda klinis berupa marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor”. Berdasarkan definisi di atas, gizi buruk adalah fenomena dimana seseorang mengalami kekurangan gizi yang parah, dan bisa dilihat dari umur seseorang yang sangat berbeda dengan tinggi badannya dan berat badannya.

**2.4.2. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Gizi**

Banyak faktor yang mempengaruhi status gizi, dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi itu seperti konsumsi makanan, penyakit infeksi, maupun faktor sosial ekonomi. Di bawah ini akan di jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi, antara lain:

1. Faktor Konsumsi Makanan dan Penyakit Infeksi

Konsumsi makanan dan penyakit infeksi yang kurang memenuhi syarat gizi merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan status gizi. Gangguan gizi yang kronis pada masa anak akan tampak akibatnya terhadap pertumbuhan pada usia selanjutnya bila tidak segera ditanggulangi. Banyak faktor yang mempengaruhi status gizi seseorang baik secara langsung berpengaruh maupun yang tidak langsung. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap status gizi, khususnya anak balita adalah asupan zat gizi dari konsumsi makan.

2. Faktor Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan juga menentukan pola makan apa yang dibeli dengan uang tersebut (faktor ekonomi dan kekuatan daya beli). Jika pendapatan meningkat, pembelanjaan untuk membeli makanan juga meningkat. Dengan demikian pendapatan merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kualitas makanan yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap status gizi. Semakin tinggi pendapatan semakin besar porsi kalori dari sumber pangan baik dari segi protein hewani maupun dari sumber nabati pada kelompok berpendapatan tinggi. Demikian juga sebaliknya, semakin lemah atau rendah pendapatan akan semakin jelek tingkat pemenuhan kebutuhan akan gizi.

3. Faktor Ketersediaan Bahan Pangan

Penyebab masalah gizi yang pokok di tempat paling sedikit dua pertiga dunia adalah kurang cukupnya pangan untuk pertumbuhan normal, kesehatan, dan kegiatan normal. Kurang cukupnya pangan berkaitan dengan ketersediaan pangan dalam keluarga. Tidak tersedianya pangan dalam keluarga yang terjadi terus menerus akan menyebabkan terjadinya penyakit kurang gizi.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang buruk seperti air minum yang tidak bersih, tidak adanya saluran penampung air limbah, tidak menggunakan kloset yang baik, juga kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan penyebaran kuman pathogen. Lingkungan yang mempunyai iklim tertentu berhubungan dengan jenis tumbuhan yang dapat hidup sehingga berhubungan produksi tanaman

5. Faktor Biologis atau Keturunan

Sifat yang diwariskan memegang kunci bagi ukuran akhir yang dapat dicapai oleh anak. Keadaan gizi sebagian besar menentukan kesanggupan untuk mencapai ukuran yang ditentukan oleh pewarisan sifat tersebut. Di negara-negara berkembang memperlihatkan perbaikan gizi pada tahun-tahun terakhir mengakibatkan perubahan tinggi badan yang jelas.

**2.4.3.  Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan**

Tabel angka kecukupan gizi bagi orang Indonesia, dengan pembagian untuk Anak, Laki-laki, Wanita, Hamil, dan Menyusui. Angka ini untuk remaja dan dewasa berkisar diangka 2000 Kkal. Berikut ini menurut Sunita Almatsier (2009 : 306) kebutuhan energi dalam satuan Kkal (berat dan tinggi menyesuaikan)

**1.      Anak-anak :**

0 - 6 bl, 550

7 - 12 bl, 650

1 - 3 th, 1000

4 - 6 th, 1550

7 - 9 th, 1800

**2.      Laki-laki:**

10 - 12 th, 2050

13 - 15 th, 2400

16 - 18 th, 2600

19 - 29 th, 2550

30 - 49 th, 2350

50 - 64 th, 2250

60+      th, 2050

**3.      Wanita:**

10 - 12 th, 2050

13 - 15 th, 2350

16 - 18 th, 2200

19 - 29 th, 1900

30 - 49 th, 1800

50 - 64 th, 1750

60+ th, 1600

**4.      Ibu Hamil:**

Trimester 1, +180

Trimester 2, +300

Trimester 3, +300

**5.      Menyusui:**

6 bl 1, +500

6 bl 2, +550

Untuk kondisi normal, kebutuhan Vitamin C angkanya hanya 90mg, kebutuhan tertinggi saat menyusui (+45 mg). Mengkonsumsi vitamin C secara berlebihan tidak ada gunanya bagi tubuh kita, kelebihan ini akan dibuang lewat air seni.

**2.4.4. Ciri-Ciri Gizi Buruk**

Gizi buruk terbagi menjadi 3 ciri yang masuk dalam katagori gizi buruk yang parah menurut Gibson dalam Rusliati (2015 : 141) menyatakan bahwa tanda gizi buruk adalah :

**1. Kwarshiorkor**

Kwarshiorkor adalah salah satu bentuk malnutrisi protein berat yang disebabkan oleh intake protein yang inadekuat dengan intek karbohidrat yang normal atau tinggi. Tanda-tanda yang sering terjadi pada penderita ini adalah sebagai berikut:

a. Gagal untuk memenuhi berat badan.

b. Wajah membulat dan sembab.

c. Rambut pirang, kusam dan mudah dicabut.

d. Penurunan masa otot.

e. Perlemankan hati, gangguan fungsi ginjal, dan anemia.

f. Dermatitis perubahan pigmen kulit.

**2. Marasmus**

Marasmus disebabkan oleh kurangnya kalori yang berlebihan, sehingga membuat cadangan makanan yang tersimpan dalam tubuh terpaksa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup. Tanda-tanda yang bisa dijumpai dalam penderita ini adalah :

a. Sangat kurus, tinggal tulang terbungkus kulit bahkan sampai berat badannya di bawah waktu lahir.

b. Wajahnya seperti orang tua

c. Kulit keriput

d. Pantat da paha kosong tinggal tulang

**3. Marasmus-Kwashiorkor**

Marasmus-Kwashiorkor adalah sejumlah anak yang menunjukan keadaan mirip marasmus yang ditandai dengan adanya oedema, menurunnya kadar protein, kulit mongering, dan kusam serta otot menjadi lemah. Tanda-tanda yang terjadi terhadap penderita tersebut adalah gabungan dari penderita kwashiorkor dan marasmus.

**2.4.5. Cara Perawatan Anak**

Perawatan anak terdiri dari hal-hal berikut ini :

**A. Kebersihan Anak**

1. Memandikan dengan sabun 2x sehari.

2. Cuci rambut dengan sampo 3x seminggu.

3. Cuci tangan dengan sabun sebelum makan, setelah buang air besar, buang air kecil, dan setelah bermain.

4. Jaga kebersihan telinga anak.

5. Gunting kuku tangan dan kakinya jika panjang.

6. Ajari buang air besar dan air kecil di WC.

7. Jaga kebersihan pakaian, mainan, dan tempat tidur.

8. Jaga kebersihan perlengkapan makan dan minum.

**B. Perawatan Gigi**

1. Jika giginya belum tumbuh, bersihkan gusinya setiap selesai menyusu dengan kain yang dibasahi dengan air hangat.

2. Ajari anak menggosok gigi sendiri.

3. Jangan biasakan makan yang manis dan lengket.

4. Periksakan tiap 6 bulan sekali ke puskesmas atau dokter gigi.

**C. Nutrisi**

1. Lanjutkan beri makan makanan orang dewasa.

2. Tambahkan porsi makan menjadi setengah piring.

3. Berikan makanan selingan 2x sehari.

4. Jangan berikan makanan manis sebelum waktu makan, sebab bisa mengurangi nafsu makan.

**D. Imunisasi**

Bertujuan untuk melindungi anak dari penyakit, mencegah anak cacat, dan mencegah kematian anak. Imunisasi yang harus didapatkan adalah Hepatitis B, BCG, Polio, DPT, dan Campak di usia 0-9 bulan.

**E. Tidur**

Anak membutuhkan sekitar 12 hingga 14 jam untuk tidur.

**2.4.6 Penanggulangan Gizi Buruk**

Anak-anak adalah salah satu harapan bangsa untuk membangun bangsa suatu negara agar mampu tetap bersaing dengan negara lain, peningkatan SDM harus di lakukan sejak dini agar melahirkan penerus bangsa yang cerdas dan sehat. Adapun penanggulangan gizi buruk menurut Depkes RI (2005) adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan cakupan deteksi dini gizi buruk melalui penimbangan bulanan balita di posyandu.

b. Meningkatkan cakupan dan kualitas tata laksana kasus gizi buruk di puskesmas atau RS dan rumah tangga.

c. Menyediakan Pemberian Makanan Tambahan pemulihan (PMT-P) kepada balita kurang gizi dari keluarga miskin.

d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam memberikan asuhan gizi kepada anak (ASI/MP-ASI).

e. Memberikan suplemen gizi (kapsul vitamin A) kepada semua balita

**2.5 . Pelayanan Sosial**

**2.5.1 Pengertian Pelayanan Sosial**

Kesejahteraan sosial mencakup pelayanan-pelayanan sosial yang terdapat di masyarakat sebagai upaya dalam membantu mengurangi masalah sosial agar terjalin sebuah keberfungsian sosial yang ada di masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Definisi pelayanan sosial menurut (Adi, 2015: 107) menyatakan:

Pelayanan sosial adalah suatu program ataupun kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dapat ditunjukkan pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas, ataupun komunitas sebagai suatu kesatuan.

Pelayanan sosial adalah suatu upaya yang bertujuan untuk pemecahan masalah, kebutuhan masyarakat dan peranan sosial masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari demi tercapainya suatu keberfungsian sosial dalam konteks individu, kelompok, maupun masyarakat. Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkingan sosialnya. Pelayanan sosial kemudian berkembang dan mencakup kesehatan, pendidikan, perumahan, demikian juga program kesejahteraan anak, keluarga, dan rumah sakit. Adapun definisi mengenai Pelayanan Sosial menurut Huraerah (2011:45) adalah :

Pelayanan sosial merupakan kegiatan terorganisir yang ditunjukan untuk membantu warga negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini antara lain berupa pelayanan sosial bagi anak (termasuk balita dan remaja) serta usia lanjut terlantar atau mengalami berbagai bentuk kecacatan.

Pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang merupakan pelayanan terhadap anak-anak dan lanjut usia tidak maksmimal dan menagalami kecacatan dan berakibat tidak mampunya keluarga untuk melaksanakan fungsi sosial dan tidak terpenuhinya kebutuhan sosial seseorang. Sedangkan menurut Suharto (2009: 154) menyatakan bahwa : “Pelayanan sosial merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial, serta dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditunjukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memahami kebutuhan hidupnya.”

Pelayanan sosial dapat dijadikan sebagai program untuk dapat mengatasi berbagai hambatan individu, kelompok, dan masyarakat. Maka pelayanan sosial sangat dibutuhkan seiring dengan adanya perkembangan zaman yang kini telah ada agar tetap bisa dan mampu membatu orang yang memiliki permasalahan sosialnya.

**2.5.2 Fungsi pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial diadakan untuk melindungi masyarakat yang mengalami masalah sosial, mengadakan perubahan untuk mencapai keberfungsian sosial seseorang, atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai dan pengembangan hubungan sosial yang di masa lampau menjadu fungsi keluarga, lingkungan tetangga dan kerabat. Pelayanan sosial cenderung menjadi pelayanan yang ditunjukan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan khusus.

**2.5.3 Bidang-Bidang Pelayanan Sosial**

Masalah sosial dalam cakupannya yaitu masalah sosial, ekonomi, sosial-psikologis. Bidang-bidang pelayanan sosial tidak hanya mencangkup masalah dasar saja, tetapi masalah yang lebih luas mencangkup pelayanan klinis sampai penataan sistem masyarakat. Pelayanan sosial sebagai suatu gambaran suatu aktifitas pekerja sosial dalam praktik nya. Bidang-bidang pelayanan sosial menurut Merton & Nisbet (1976) dalam Wibhawa, (2010: 76) adalah sebagai berikut :

1. Perilaku Menyimpang (*Deviant behavior*)

1. Tindakan kejahatan dan kenakalan remaja (*Crime and Juvenile Deliquency*).
2. Gangguan-gangguan mental (*Mental Disorders*)
3. Penggunaan obat-obatan terlarang (*drugs abuse*)
4. Kecanduan alcohol dan pemabukan (*Alcoholism and Dringking*)
5. Perilaku seksual (*Sexual Behavior*)

2. Disorganisasi Sosial (*Social Disorganization*)

1. Krisis kependudukan dunia (*The Worlds Populations Crisis*)
2. Kesehatan dan ketidaksetaraan (*Equality and Linequality*)
3. Lansia (*Age and Aging*)
4. Peranan-peranan seksual (*Sex Roles*)
5. Ras dan hubungan antar kelompok di dalam masyarakat (*Race and Intergroup Relation*)
6. Disorganisasi komunitas dan masalah-masalah perkotaan (*Community Disorganization and Urban Probrems*)
7. Dunia Pekerjaan (*The World of Work*)
8. Kemiskinan dan Proletariat (*Provement and Proletariat*)
9. Kekerasan Kolektif (*Collective Violence*)

## 2.6 Konsep Pekerja Sosial

### 2.6.1 Definisi Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial suatu profesi pelayanan kepada manusia (individu, kelompok, dan masyarakat dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah mengenai *human relation* (relasi antar manusia). Tujuan dari pekerja sosial adalah untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat agar dapat memecahkan masalahnya. Masalah yang dapat timbul karena kebutuhan, rintangan dan ketidak berfungsian sosial. Definisi Pekerjaan Sosial menurut Zastrow (1999) dalam Huraerah (2011:38), adalah sebagai berikut :

aktifitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Definisi di atas bahwa pekerjaan sosial erat kaitannya dengan kegiatan untuk membantu menolong dari masalah sosial yang dihadapi individu atau kelompok maupun masyarakat untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya agar dapat menjalankan fungsi dan tugas hidupnya di dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Pekerjaan sosial suatu profesi pelayanan kepada manusia (individu, kelompok, dan masyarakat dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah mengenai *human relation* (relasi antar manusia). Tujuan dari pekerja sosial adalah untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat agar dapat memecahkan masalahnya. Masalah yang dapat timbul karena kebutuhan, rintangan dan ketidak berfungsian sosial. Oleh sebab itu, relasi antar manusia merupakan inti dari profesi pekerjaan sosial.

### 2.6.2 Fungsi Dasar Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi dasar pekerjaan sosial menurut Max Siporin, (1975) dalam Huraerah (2008: 39) adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan akses *(access services),* mencakup pelayanan informasi,rujukan, advokasi, dan partisipasi. Tujuannya membantu orang agar bisa mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia
2. Pelayanan terapis, pertolongan, dan rehabilitas, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi orang-orang usia lanjut (jompo), dan sebagainya.
3. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti KB (keluarga berencana), pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyarakat, dan sebaginya.

Strategi intervensi pekerjaan sosial tidak bersifat pasif, melainkan holistik dan berkelanjutan menurut (Suharto, 2006; 2007), adalah sebagai berikut : “Fokus utama penanganan masalah kemiskinan adalah pada kemiskinan adalah pelayanan sosial.” Model intervensi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka atau sekurang kurangnya melindungi mereka dari situasi-situasi yang dapat mempengaruhi pemenuuhan kebutuhan dasarnya. Mengacu pada prinsip-prinsip profesi pekerja sosial, maka kebijakan dan program perlindungan sosial mencakup bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang dikembangkan berdasarkan right-based initiatives; yakni memperhatikan secara sungguh-sungguh hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan aspirasi terbaik mereka.

**2.7 Tinjauan Persepsi**

**2.7.1 Pengertian Persepsi**

Persepsi merupakan proses memberi makna terhadap stimulus yang berupa informasi mengenai lingkungannya yang diterima oleh panca indranya yang di tentukan juga oleh faktor personal dan situasional. Faktor personal dapat dilihat dari faktor keberfungsian dari panca indra, sedangkan situasional dapat dilihat dari keadaan pada saat individu tersebut menerima rangsang. Pengertian persepsi menurut Rahmat (2005 : 51), sebagai berikut : “Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi”. Teori di atas menyatakan bahwa persepsi adalah suatu pengalaman seseorang tentang suatu objek dan peristiwa yang di tangkap oleh panca indranya lalu mampu memperoleh informasi dalam pemikiran sehingga mengahasilkan suatu pemahaman yang dapat menggerakan pemikiran tersebut untuk melaksanakan suatu tindakan untuk menanggulangi masalah yang terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat pandangan lain menurut Syamsudin (2002 : 21) sebagai berikut : “Manusia pada dirinya memiliki sejumlah potensi yang dapat bermanfaat dalam kehidupannya manakala potensi tersebut memperoleh stimulus dari lingkungan”. Hal ini mengandung makna bahwa manusia akan memperoleh keberhasilan jika potensi yang di milikinya bisa dioptimalkan dan mendapatkan dukungan dari orang sekitarnya agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Persepsi merupakan inti dari pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada di dunia dan lingkungan sekelilingnya. Persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang kita serap oleh panca indra kita serta sebagaiannya dari pengolahan ingatan berdasarkan pengalaman yang di milikinya. Pengertian persepsi menurut Sarwono, (2012:86) adalah sebagai berikut : “Persepsi adalah seseorang yang menerima stimulus dari luar yang ditangkap oleh organ-organ bantuannya yang kemudian masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berfikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman”. Teori di atas menyatakan bahwa persepsi merupakan proses berfikir seseorang atau masyarakat dalam mengelompokan dan menginterpretasikan suatu objek yang masuk ke dalam organ-organnya dan mulai menciptakan suatu interaksi dari satu kelompok ke kelompok lain, dan mampu menciptakan suatu partisipasi dalam dirinya untuk menanggulangi masalah sosial yang terjadi.

Berdasarkan ketiga definisi persepsi di atas yang sesuai dengan topic penelitian “Hubungan Persepsi Orang Tua Tentang Pentingnya Pemberian Gizi Bagi Anak Dengan Partisipasinya Untuk Menanggulangi Masalah Anak Gizi Buruk di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor” adalah definisi menurut Rahmat (2005 : 51). Definisi tersebut berhubungan dengan variabel dan objek penelitian penulis, yaitu anak penderita gizi buruk.

**2.7.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Persepsi yang dimiliki setiap individu akan berbeda karena stimulus yang diterima oleh individu juga berbeda, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi persepsi individu. Dalam buku psikologi umum terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi persepsi individu, yaitu sebagai berikut :

**1. Faktor Internal**

Faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang dapat juga mempengaruhi persepsi yang akan muncul pada seseorang, faktor internal mencakup pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Fisiologis

Informasi masuk melalui alat indra, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indra untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

1. Perhatian

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek

1. Minat

Persepsi terhadap suatu objek bervariasi, tergantung pada seberapa banyak energi atau *perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagi minat.

1. Kebutuhan yang terarah

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

1. Pengalaman dan ingatan

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

1. Suasana hati

Keadaan emosi mempengaruhi prilaku seseorang, *mood* ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

**2. Faktor Eksternal**

Karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlihat didalamnya merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, antara lain :

1. Hubungan dengan obyek

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan dengan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek individu akan mudah untuk diperhatikan pada gilirannya membentuk persepsi.

1. Warna dari obyek-obyek

Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (*to be percived*) dibandingkan dengan yang sedikit.

1. Keunikan dan kekontrasan stimulus

Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

1. Intensitas dan kekuatan dari stimulus

Stimulus dari suatu obyek akan memberi makna lebih banyak pada obyek yang sering diperhatikan, dibandingkan dengan obyek yang hanya dilihat. Ketuatan dari stimulus merupakan data dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.

1. *Motion* atau gerakan

Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.

**2.8 Tinjauan Partisipasi**

**2.8.1 Pengertian Partisipasi**

Partisipasi secara umum digambarkan sebagai suatu hubungan dari individu ataupun masyarakat terhadap suatu kegiatan, baik itu dilakukan sebelum kegiatan dalam bentuk pemikiran dan perencanaan, lalu di dalam pelaksanaannya ada tenaga, biaya dan lain-lain. Menurut Keith Davis dikutip oleh Huraerah (2009 : 95) adalah sebagai berikut:

Partisipasi di definisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya.

Definisi di atas menyatakan bahwa partisipasi yang di lakukan oleh semua pihak mampu memberikan kontribusi dan bantuan yang signifikan, bila setiap elemen masyarakat tidak ikut berpartisipasi secara sosial penekanan angka gizi buruk tidak akan berkurang. Kemudian definisi partisipasi dengan mengutip beberapa pendapat ahli barat, Ndraha (1987: 1) dalam Huraerah ( 2009 : 96) menyimpulkan bahwa partisipasi meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain (contact Change) sebagai satu di Antara titik awal perubahan social.
2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya).
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana)
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan (participation in benefit)
6. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan.

Definisi di atas menyatakan bahwa partisipasi merupakan sebuah keterlibatan dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok dan mendorong untuk menyumbangkan pada tujuan tertentu serta dapat bertanggung jawab terhadap suatu hal yang dijalaninya seperti mengikuti dan berpartisipasi dalam pelayanan yang dapat memajukan masyarakat. Selain definisi tersebut, terdapat pula definisi partisipasi menurut Mubyarto (1985) dalam Fahrudin (2012: 37) yang mendefinisikan partisipasi adalah “Kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri”.

Berdasarkan definisi partisipasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu keterlibatan seseorang yang didasarkan karena adanya kesadaran dan juga pemikiran sehingga mendorong untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan adanya rasa tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kemudian partisipasi memiliki arti yang luas dan bukan hanya dalam pelaksanaannya saja seperti yang di tafsirkan akan tetapi meliputi kegiatan pengambilan keputusan hingga menikmati dari hasil tersebut.

Berdasarkan ketiga definisi partisipasi di atas yang sesuai dengan topic penelitian “Hubungan Persepsi Orang Tua Tentang Pentingnya Pemberian Gizi Bagi Anak Dengan Partisipasinya Untuk Menanggulangi Masalah Anak Gizi Buruk di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor” adalah definisi menurut Keith Davis dikutip oleh Huraerah (2009 : 95). Penulis tertarik terhadap definisi tersebut karena partisipasi di definisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang, sesuai dengan topic penelitian dalam upaya meningkatkan partisipasi orang tua dalam menanggulangi masalah anak gizi buruk dengan menjadikan keterlibatan mental dan emosi sebagai dimensi dari variabel.

**2.8.2 Pengelompokan Partisipasi Masyarakat**

Ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama jika dikaitkan dengan praktik pembangunan masyarakat yang demokratis, sebagaimana dikemukakakn Geventa dan Velderama dalam Suhirman (2003), yaitu:

1. Partisipasi politik : representasi dalam demokrasi. Tujuannya untuk mempengruhi dan mendudukan wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan daripada melibatkan langsung masyarakat dalam proses-proses pemerintahan.
2. Partisipasi sosial: keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat dipandang sebagai ‘beneficiary’ pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi program. Dengan demikian, partisipasi diletakan di luar lembaga formal pemerintahan seperti forum warga.
3. Partisipasi warga: pengambilan keputusan langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima (objek), tetapi sebagai subjek dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Sementara menurut Najib (2005) dalam Hueaerah (2009 : 100) jika dilihat dari penggunaannya partisipasi dapat dikelompokan menjadi:

* 1. Partisipasi sebagai alat

Melalui partisipasi pemerintah diharapkan mampu menyusun berbagai kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga, serta mampu mendorong pengelolaan pemerintahan yang transparan, efektif, bertanggungjawab, dan efisien.

* 1. Partisipasi sebagai tujuan

Setiap warga Negara memiliki hak untuk terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan yang diharapkan berdampak pada kehidupannya. Partisipasi warga merupakan salah satuaspek dari kehidupan bernegara, di mana warga memiliki hak untuk terlibat dalam proses penyusunan serta pengambilan keputusan berbagai kebijakan.

Pengertian yang beragam terjadi karena pemahaman terhadap konsep partisipasi itu berbeda-beda. Dari dua konsep partisipasi tersebut, sebetulnya memiliki satu kesamaan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk terlibat (berpartisipasi) dalam setiap kegiatan yang mempengaruhi hidupnya, baik melalui lembagaformal maupun lembaga non-formal.

**2.8.3 Tingkatan Partisipasi Masyarakat**

Karena konsep partisipasi dalam perkembangannya memiliki makna yang luas dan memiliki arti yang berbeda-beda, bahkan apapun yang disebut “partisipasi”, makan untuk memudahkan memaknainya dapat digunakan tingkatan partisipasi. Menurut Asia Development Bank (ADB) seperti dikutip Soegijoko (2005) dalam Huraerah (2009 : 100), tingkatan partisipasi (dari yang terendah sampai tertinggi) sebagai berikut :

* + - * 1. Berbagai informasi bersama (sosialisasi)

Pemerintah hanya menyebarkluaskan informasi tentang program yang akan direncanakan atau sekedar memberikan informasi mengenai keputusan yang dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan keputusan tersebut.

* + - * 1. Konsultasi/ mendapatkan ympan balik

Pemerintah meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan.

* + - * 1. Kolaborasi/pembuatan keputusan bersama

Masyarakat bukan sebagaipenggagas kolaborasi, tetapi masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama, sehingga peran masyarakat secara signifikan dapat mempengaruhi hasil/keputusan.

* 1. Pemberdayaan /kendali

Masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggnakan prosedur dan indicator kinerja yang mereka tetapkan bersama.

Hoofsteede seperti dikutip Khairuddin (1992:124) dalam Huraerah (2009:101) membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Partisipasi inisiasi (inisiation participation) adalah partisipasi yang mengandung inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat.
2. Partisipasi legitimasi (legitimation participation) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
3. Partisipasi eksekusi (execution participation) adalah partisipasi pada tingkatan pelaksanaan.

**2.8.4 Bentuk Partisipasi masyarakat**

Bentuk partisipasi yang dimaksud adalah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok, atau masyarakat yang berpartisipasi. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, pendapat Hamijoyo dan Iskandar, yang dikutip Pasaribu dan Simanjuntak (1986:349) dalam Huraerah (2009 : 102) memperinci jenis-jenis partisipasi sebagai berikut:

* 1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sono, pertemuan atau rapat.
  2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
  3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang alam berbagi kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan seagainya.
  4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industry.
  5. Partisipasi social, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), nyam-bungan, mulang sambung.

Sedangkan menurut Sulaiman (1985 : 23) dalam Huraerah (2009 : 103) membagi bentuk-bentuk partisipasi social kedalam lima macam yaitu:

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secaara fisik dan tatap muka
2. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana, dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa diperlukan dari luar, hanys bersifat sementara dan sebagai umpan
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
5. Partisipasi refresentatif dengan memberikan kepercayaan dan mandate kepada wakil-akil yang duduk dalam organisasi atau panitia

**2.8.5 Motif Partisipasi Masyarakat**

Seseorang melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu karena ada motif yang menggerakannya, begitu juga dengan hal ini apabila ketika seseorang, kelompok atau kesatuan masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan karena dilandasi oleh motif-motif yang dalam hal ini yaitu berpartisipasi dalam pelayanan. Menurut Billah seperti dikutip Taher (1987 : 146-149) dalam Huraerah (2009 : 105) yaitu:

1. Motif psikologi

Kepuasan pribadi, pencapaian prestasi, atau rasa telah mencapai sesuatu (achievement) dapat merupakan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk melakukan kegiatan, termasuk juga untuk berpartisipasi meskipun kegiatan atau partisipasinya itu tidak akan menghasilkan keuntungan (baik berupa uang atau materi). Oleh karena itu, usaha meningkatkan partisipasi berarti pula usaha memberikan kesempatan kepada setiap warga masyarakat, yaitu kesempatan untuk mengekspreikan dirinya dan menyatakan aspirasinya serta keleluasaan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Persoalannya adalah bagaimana mengatur mekanisme agar usaha mencapai kepuasan itu tidak merugikan anggota lain.

1. Motif sosial

Ada dua sisi motif social, yakni untuk memperoleh status social da nada untuk menghindarkan dari terkena pengendalian social (social control). Orang akan dengan suka hati berpartisipasi di dalam suatu kegiatan (pembangunan) manakala keikutsertaannya itu akan membawa dampak meningkatnyastatus sosialnya.

1. Motif keagamaan

Berbeda dengan motif prikologi yang didasarkan pada pencapaian prestasi dan motif social yang berlandaskan status social dan pengendalian social, motif keagamaan didasarkan pada kepercayaan kepada kekuatan yang ada di luar manusia Tuhan, sesuatu yang gaib, supranatural). Agama sebagai ideologi social yang mempunyai berbagai macam fungsi bagi pemeluknya, yaitu fungsi-fungsi: *inspiratif, normatif, identifikatif, dan operatif/motifatif.* Melalui aktualisasi fungsi-fungsi itu agama dapat meningkatkan peranannya di dalam proses pembangunan, dan lebih dai itu agama dapat meningkatkan peran para pemeluknya dalam proses pembangunan. Persoalannya adalah bagaimana menemukan idiom dan lambing-lambang yang dapat mengintegrasikan agama dengan proses pembangunan.

1. Motif ekonomi

Laba (profit) adalah motif ekonomi yang dapat dan bahkan seringkali efektif mendorong orang mengambil keputusan untuk ikut berparisipasi di dalam kegiatan (pembangunan). Pengambilan keputusan (yang bersifat ekonomis) dapat mengambil dua bentuk strategi, yaitu: maximum profit dan minimum cost. Dengan menggunakan tata nalar ekonomi ini orang akan memutuskan berpartisipasi (dalam suatu kegiatan) manakala kegiatan-kegiatan itu dapat menghasilkan manfaat/keuntungan bagi dirinya atau bagi perusahaan/kelompoknya, atau setidakny ia akan ikut berpartisipasi jika tidak akan memperoleh kerugian atau paling tidak kerugian yang diperoloh dari partisipasinya lebih kecil daripada kerugian yang dapat diderita karena tidak ikut berpartisipasi.

1. Motif politik

Dasar utama politik ini adalah kekuasaan. Oleh karena itu, partisipasi seseorang atau golongan akan ditentukan oleh besr-kecilnya kekuasaan yang dapat diperoleh dari partisipasinya didalam berbagai kegitan (pembangunan). Makin besar kekuasaan yang mungkin diperoleh dari keterlibatannya didalam kegiatan (pembangunan), maka makin kuat pula kemungkinan untuk ikut berpartisipasi.